

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH
INSPEKTUR POLISI DI SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Idham Andayana Sudrajat

NIM 21.C.20099

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH
INSPEKTUR POLISI DI SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Idham Andayana Sudrajat

NIM 21.C.20099

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Pemenuhan hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dan wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk terhadap peserta didik pendidikan kedinasan kepolisian. Peserta didik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri berada dalam lingkungan pendidikan dengan intensitas fisik dan mental yang tinggi, sehingga memiliki kebutuhan kesehatan yang spesifik dan berbeda dari masyarakat umum. Di sisi lain, peserta didik TNI/Polri dikecualikan dari kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga pemenuhan hak kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi Polri. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana pengaturan dan penerapan pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP telah menjamin perlindungan hak kesehatan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak kesehatan bagi peserta didik SIP serta menilai penerapannya di Setukpa Lemdiklat Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Polri, serta studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan tenaga kesehatan, pengelola pendidikan, peserta didik, BPJS Kesehatan, dan ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan konsep hak atas kesehatan berdasarkan prinsip *Availability, Accessibility, Acceptability, dan Quality (AAAQ)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP telah memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan, peraturan pelaksana, hingga regulasi internal Polri. Namun dalam penerapannya, struktur hukum layanan kesehatan telah terbentuk tetapi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas pada kondisi pendidikan berintensitas tinggi, sementara budaya hukum masih menjadi hambatan utama, terutama dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan peserta didik SIP di Setukpa belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: hak kesehatan, peserta didik SIP, Setukpa Polri, hukum kesehatan, HAM.

ABSTRACT

The fulfillment of the right to health is an integral part of human rights guaranteed by the constitution and must be ensured by the state, including for participants in police professional education. Students of the Police Inspector School (SIP) at the Police Officer Training School (Setukpa) of the Indonesian National Police Education and Training Institute operate in an educational environment characterized by high physical and mental intensity, resulting in specific health needs distinct from those of the general public. Furthermore, SIP students are excluded from the National Health Insurance (BPJS Kesehatan) scheme, placing full responsibility for health services on the police institution. This condition raises legal issues concerning whether the regulation and implementation of health rights fulfillment adequately protect SIP students' right to health.

This study aims to analyze the legal framework governing the fulfillment of health rights for SIP students and to assess its implementation at Setukpa Lemdiklat Polri. The research employs a socio-legal (juridical–sociological) method with a qualitative approach. Data were collected through literature review of laws and internal police regulations, as well as field research involving observations and interviews with healthcare personnel, education administrators, students, BPJS representatives, and legal experts. The analysis applies Lawrence M. Friedman's legal system theory and the right-to-health framework based on the Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality (AAAQ) principles.

The findings indicate that normatively, the regulation of health rights fulfillment for SIP students is supported by a comprehensive and layered legal framework, ranging from the 1945 Constitution and Health Law to implementing regulations and internal police policies. However, in practice, although the legal structure for health services has been established, it has not been fully optimal due to capacity limitations during periods of high training intensity. Moreover, legal culture remains a significant challenge, particularly regarding the utilization of mental health services. Therefore, the fulfillment of health rights for SIP students at Setukpa has not yet been fully effective and sustainable.

Keywords: *right to health, police inspector students, Setukpa Polri, health law, human rights.*